



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : M.HH.KP.01.04- 34
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Rencana Penempatan dan Kualifikasi
Pendidikan pada Kebutuhan Jabatan Prioritas
Kementerian Hukum dan HAM T.A. 2017

2 Juni 2017

**Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di Tempat**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor R/922/M.SM.01.00/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan Pegawai ASN untuk Jabatan Prioritas Tahun 2017 sebanyak 17.526 formasi dan rapat koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 24 Mei 2017. Bersama ini kami lampirkan rencana penempatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan dan mekanisme serta jadwal pelaksanaan seleksi CPNS pada Kebutuhan Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017, untuk mendapatkan penetapan alokasi formasi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**


Yasonna H. Laoly

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

TAHAPAN SELEKSI

SLTA Sederajat

1. Seleksi Administrasi,
2. Tes Kompetensi Dasar (TKD) melalui CAT-BKN
3. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - a. Tes Kesamaptaan.
 - b. Wawancara.

Sarjana

1. Seleksi Administrasi,
2. Tes Kompetensi Dasar (TKD) melalui CAT-BKN,
3. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - a. Tes Kompetensi Bidang melalui CAT-BKN , Khusus Formasi Pengelola TI langsung dengan praktek
 - b. Wawancara disertai pengamatan fisik.

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pendaftaran Online melalui <http://sscn.bkn.go.id> kecuali Papua dan Papua Barat
2. Berkas Lamaran untuk Dokter Spesialis (S2) dan Sarjana (S1) di unggah melalui website cpns.kemenumham.go.id (seleksi dilakukan oleh Panitia Pusat) sedangkan Berkas Lamaran untuk SLTA dikirim via PO BOX (seleksi dilakukan oleh Panitia Daerah);
3. Khusus SLTA pendaftaran dibatasi wilayah domisili KTP, Dokter Spesialis dan Sarjana / S1 tidak dibatasi;
4. Peserta dapat mengubah lokasi Tes Kompetensi Bidang (TKB) setelah melihat distribusi kelulusan Peserta TKD per Kanwil;
5. Khusus untuk Petugas Penjagaan, Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian, Pembimbing Kemasyarakatan terdapat kuota berdasarkan jenis kelamin;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,


Yasonna H. Laoly

NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI
1	Petugas Penjagaan	SLTA Sederajat	14,000
2	Pembimbing Kemasyarakatan	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen / S1 Sospol/ S1 Ekonomi / S1 Hukum / S1 Akuntansi dan Manajemen / S1 Ilmu Pendidikan	714
3	Analisis Keimigrasian	S1 Hukum/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi/S1 Teknik Informatika / S1 Sistem Informasi / S1 Ilmu Komputer / S1 Teknik Komputer / S1 Sastra Bahasa Asing / S1 Ilmu Komunikasi	2,278
4	Pemeriksa Merek	S1 Hukum / S1 Manajemen / S1 Teknik / S1 Farmasi / S1 Humaniora	15
5	Pemeriksa Paten	S1 Kimia / S1 Biologi / S1 Farmasi / S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika / S1 Teknik Mesin / S1 Teknik Sipil / S1 Teknologi Pertanian / S1 Teknologi Perikanan dan Teknik di bidang International Patent Classification (IPC)	15
6	Analisis Kekayaan Intelektual	S1 Seni Rupa, Desain dan / atau Teknik, S1 Hukum, S1 Manajemen	15
7	Analisis Hukum	S1 Hukum	136
8	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM	S1 Hukum dan S1 Sosial Politik	40
9	Penata Keuangan	S1 Manajemen Keuangan / S1 Ekonomi Manajemen / S1 Akuntansi	25
10	Kustodian Kekayaan Negara	S1 Ilmu Bisnis Dan Manajemen / S1 Sospol / S1 Ekonomi Manajemen / S1 Hukum/ S1 Akuntansi	20
11	Pengelola Teknologi Informasi	S1 Teknik Informatika / S1 Sistem Informasi / S1 Ilmu Komputer / S1 Teknik Komputer	70
12	Dokter Umum	S1 Kedokteran	33
13	Perawat	S1 Keperawatan	100
14	Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Kedokteran Spesialis Kulit	1
15	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam	1
16	Dokter Spesialis Anak	Kedokteran Spesialis Anak	1
17	Dokter Spesialis Ginekologi	Kedokteran Spesialis Ginekologi	1
18	Dokter Anestesi	Kedokteran Spesialis Anestesi	1
19	Psikolog Klinis	S1 Psikologi	15
20	Pemeriksa Keimigrasian	SLTA Sederajat	30
21	Auditor	S1 Ilmu Hukum / S1 Psikologi / S1 Ilmu Komunikasi / S1 Administrasi Pendidikan / S1 Teknik Informatika / S1 Ilmu Komputer / S1 Sistem Informasi / S1 Administrasi Negara / S1 Administrasi Bisnis / S1 Administrasi Perpajakan	15
JUMLAH			17,526

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Yasonna H. Laoly

PERSYARATAN (SLTA Sederajat)

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pria/Wanita.
3. Pendidikan SMA sederajat dengan nilai Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol), khusus untuk putra daerah asli Papua dan Papua Barat nilai Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol).
4. Usia pada tanggal 1 Juli 2017 serendah-rendahnya 18 tahun dan tidak lebih dari 28 tahun (dibuktikan dengan akta Kelahiran/surat keterangan Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
5. Tinggi Badan minimal Pria 160 cm, Wanita minimal 155 cm, berat badan seimbang .
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak tuli, dan tidak buta warna.
7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga.

PERSYARATAN (Dokter Spesialis dan Sarjana)

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pria/Wanita.
3. Nilai IPK Sarjana (S1) Minimal 2,75 (Khusus Papua dan Papua Barat minimal IPK minimal 2,5).
4. Usia pada tanggal 1 Juli 2017 serendah-rendahnya 20 tahun dan tidak lebih dari 33 tahun (dibuktikan dengan akta Kelahiran/surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak tuli, dan tidak buta warna.
6. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
7. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Yasonna H. Laoly

Lampiran V Surat Menteri Hukum dan HAM
Nomor : M.HH.KP.01.04- 34
Tanggal : 2 Juni 2017

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI s.d PENETAPAN SK CPNS

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	3-24 Juli 2017	Pengumuman Pengadaan CPNS Tahun 2017	
2	25 Juli – 28 Agustus 2017	Pendaftaran secara Online	
3	26 Juli - 31 Agustus 2017	Seleksi Administrasi berdasarkan Berkas yang diunggah atau dikirim	Pengumuman lulus Seleksi Administrasi 5 September 2017
4	11-14 September 2017	Verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan (bagi pelamar pada petugas penjagaan dan pemeriksa kelmigrasian)	
5	25-28 September 2017	Tes Kompetensi Dasar dengan CAT-BKN	Pengumuman lulus Tes Kompetensi Dasar (Resmi) 3 Oktober 2017
6	16 Oktober – 10 November 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tes Kompetensi Bidang dengan CAT-BKN untuk formasi Dokter Spesialis dan Sarjana (S1) dan Wawancara• Test Kompetensi Bidang khusus Pengelola Teknologi Informasi melalui praktek langsung dan Wawancara• Test Kompetensi Bidang untuk formasi SLTA melalui Test Kesamaptaan dan Wawancara	Pengumuman lulus Tes Kompetensi Bidang 24 Oktober 2017 dan Pengumuman Kelulusan Akhir 15 November 2017
7	20-30 November 2017	Pemberkasan Ulang dan Pengusulan Penetapan NIP Ke Badan Kepegawaian Negara	TMT SK CPNS : 1 Desember 2017
8	5-8 Desember 2017	Konsinyering Penetapan NIP dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan CPNS	Pelaksanaan Tugas awal Januari 2018

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia


Yasonna H. Laoly